

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Dasar

1. Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial karena setiap individu maupun lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat. Melalui peran yang dijalankan, seseorang atau suatu lembaga dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto (2017:210), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, peran berkaitan dengan tindakan dan perilaku yang dilakukan seseorang sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam masyarakat.

Sementara itu, Pasolong (2021:137) menjelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Peran menunjukkan adanya tanggung

jawab yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu.

Peran adalah suatu proses dinamis dalam kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2017:213). Peran itu mencakup tiga hal diantaranya:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini peran merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu 13 apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial ekonomi.

Dari penjelasan mengenai peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu fungsi yang harus dijalankan sesuai hak dan kewajibannya. Sehingga seseorang yang terlibat di dalam suatu peran tersebut harus bertanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan atau organisasi.

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran

Menurut Kurniawan (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Kelas sosial

Pelaksanaan peran dalam keluarga, seperti peran suami, dipengaruhi oleh kelas sosial yang berkaitan dengan tuntutan, kepentingan, dan kebutuhan dalam keluarga. Perbedaan kelas sosial akan menentukan bagaimana seseorang menjalankan perannya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang dimiliki.

2) Bentuk keluarga

Bentuk keluarga turut mempengaruhi pelaksanaan peran. Keluarga dengan orang tua tunggal memiliki perbedaan dalam pembagian peran dibandingkan dengan keluarga yang memiliki kedua orang tua lengkap. Selain itu, perbedaan antara keluarga inti dan keluarga besar juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta berpotensi menimbulkan konflik peran.

3) Latar belakang keluarga

Latar belakang keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk pelaksanaan peran, yang meliputi:

a) Kesadaran dan Kebiasaan Keluarga

Kesadaran merupakan titik keseimbangan (*equilibrium*) yang terbentuk dari berbagai pengalaman dan proses berpikir yang menghasilkan keyakinan dalam diri individu. Kebiasaan keluarga, terutama yang berkaitan dengan pola hidup sehat, seperti tidur teratur, sarapan setiap hari, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga pola makan, berolahraga, serta mengontrol berat badan, akan mempengaruhi bagaimana peran dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

b) Sumber Daya Keluarga

Sumber daya keluarga, termasuk pendapatan, merupakan segala bentuk penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Ketersediaan sumber daya ini akan mempengaruhi kemampuan individu dalam

menjalankan peran, terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

c) Siklus Keluarga

Sesuai dengan fungsi keluarga yang sedang dialami juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi peran karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Didalam siklus keluarga peran anggota berbeda misalnya ibu berperan sebagai pengasuh, pendidikan, dan pemberian kasih sayang kepada anak. ayah sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan sedangkan anak memiliki peran sebagai individu yang belajar dan menuntut ilmu.

d) Pengetahuan

Menurut Notoatmojo (2007), Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behavior*). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan tinggi tentang obyek tertentu menyebabkan seseorang dapat berfikir rasional dan mengambil keputusan.

Menurut Effendy (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran meliputi :

- 1) Faktor internal meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan, dan motiv.
- 2) Faktor eksternal meliputi: lingkungan social, fasilitas, media.

c. Bentuk Peran

Secara lebih operasional perilaku dapat diartikan sebagai respon seseorang atau organisme terhadap rangsangan (stimulus) yang berasal dari luar dirinya. Respon tersebut pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Bentuk Pasif merupakan respons internal yang terjadi di dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain. Respon ini masih bersifat terselubung (*covert behavior*), karena hanya berupa reaksi dalam bentuk sikap, persepsi, pengetahuan, atau perasaan terhadap suatu stimulus.
- 2) Bentuk Aktif merupakan respons yang dapat diamati secara langsung oleh orang lain, karena telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Respons ini disebut sebagai perilaku terbuka (*overt behavior*), yaitu tindakan individu sebagai reaksi

terhadap stimulus yang diterima (Notoatmodjo, 2003).

2. Konsep Pemberdayaan

a) Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Hakekat pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan

posisi tawar yang dimiliki. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik (Suriani Nur, 2010:101).

b) Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pada umumnya dapat difahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target capaian. Menurut Mathew dalam Mardikanto “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh Karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang

benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pendapat lain disampaikan oleh Mardikanto menyatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan adalah mengerjakan artinya harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin untuk mengerjakan sesuatu, akibat artinya pemberdayaan harus memberikan akibat atau manfaat yang baik, asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sedangkan menurut Dahama dan Bhatnagar, prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu minat dan kebutuhan masyarakat, melibatkan organisasi masyarakat bawah (keluarga), pemberdayaan harus menyesuaikan keragaman budaya lokal, kegiatan pemberdayaan jangan sampai menimbulkan *shock culture* atau perubahan budaya yang mengejutkan masyarakat, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dalam penerapan ilmu yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menawarkan penggunaan metode pemberdayaan ataupun dalam pengambilan keputusan.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu :

1) Prinsip Kesenjajaran

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek

yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

Sedangkan pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, menurut Mardikanto memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lama.
- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Karena perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa mendatang.
- 3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dalam

kegiatan/peristiwa yang lainnya(Aziz Muslim et al., 2014:13).

c) Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya.

Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) Perbaikan Kelembagaan (*better institution*).

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2) Perbaikan Usaha (*better business*).

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3) Perbaikan Pendapatan (*better income*).

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki

pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatakan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan (*better environment*).

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) Perbaikan Kehidupan (*better living*).

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaikan masyarakat (*better community*).

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Konsep Perempuan

a) Pengertian Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan,” yakni orang yang mahir atau berkuasa, kepala yang paling besar. Namun, menurut Zaitunah Subhan, yang dikutip oleh Miftahul Janaah (2009) pengertian perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut lagi Zaitunah menjelaskan bahwa pergeseran istilah

dari perempuan ke wanita. Kata wanita diketahui berasal dari bahasa sansekerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yaitu yang dinafsui atau merupakan objek sexulitas. Perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam setiap bakat yang telah Tuhan berikan(Angellyna, 2022:164).

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dengan berbagai macam kelebihan, sehingga banyak topik yang diangkat dengan latar belakang perempuan. Kelebihan-kelebihan perempuan tercakup dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perempuan menjadi tumpuan bagi pembangunan bangsa ini. Pahlawan yang membela Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme tidak hanya terlahir dari kaum laki-laki saja. Peran perempuan sebagai pembela tanah air pun tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya. Hal tersebut membuat para ahli sosial mengadopsi teori-teori perubahan

sosial dari abad ke- 18 yang menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi aktor pembawa kelangsungan pembangunan bangsa(Wafa Suci Ningrum, 2020:80).

b) Peran / tanggung jawab Perempuan

Peran perempuan merupakan seperangkat fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh perempuan sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan. Peran ini tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga dalam ranah publik sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun demikian, dalam realitas sosial masih berkembang pandangan tradisional yang menempatkan perempuan lebih dominan pada ranah domestik. Perempuan seringkali dianggap memiliki peran utama dalam rumah tangga, seperti mengasuh dan merawat anak, membersihkan rumah, serta memasak. Selain itu, perempuan juga kerap diidentikkan dengan sifat

keibuan, lemah lembut, dan emosional, sehingga dipandang lebih sesuai dalam menjalankan tugas-tugas domestik yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan(Hanapi et al., 2015).

4. Konsep Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran elasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang dan

tempat saat manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana kepermanenan dan keabadian ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki(Kartini, 2019:221).

Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (*konstruksi*) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat(Puspitawati, 2013:105).

Secara umum feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Karena itu kelompok feminis

memberikan konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial bukan dinilai dari aspek kodrati. Karenanya kajian-kajian perbedaan kodrati tidak pernah disinggung karena memang itu sudah di setting oleh Tuhan, sementara perbedaan sosial menjadi terutama kajian-kajian penting feminis atau penggiat gender hingga saat ini.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh

laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*). Proses pertumbuhan anak (*child*) menjadi seorang laki-laki (*being a man*) atau menjadi seorang perempuan (*being a woman*), lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (*love-making activities*), selebihnya digunakan istilah gender (Junaidi, 2010:246).

5. Konsep Pemberdayaan Perempuan

a) Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata *empowerment* merupakan konsep yang lahir dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, terutama Eropa (Prjono dan Pranaka, 1996:3). Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Agung pamuji,

2013:3). Pemberdayaan berarti pemberian kemampuan dari suatu individu atau kelompok yang sudah berdaya kepada individu atau masyarakat agar menjadi berdaya.

Menurut Karl M. (dalam Priyono dan Pranarka, 1996:62) pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu membangun kemandirian dan konsep diri (Hanis, 2020:129). Pemberdayaan perempuan merupakan

upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada setiap tahapan proses pembangunan. Salah satu teknik Longwe, yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks pembangunan.

Kerangka analisis gender yang dikenal sebagai Kerangka Pemberdayaan Perempuan, dari Sara H. Longwe menekankan pentingnya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan serta upaya dalam mengatasi isu-isu gender sebagai kendala dalam pemberdayaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan sekaligus mencapai kesetaraan gender. Adapun kriteria analisis dalam metode ini meliputi: (1) tingkat kesejahteraan, (2) tingkat akses terhadap sumber daya dan manfaat, (3) tingkat kesadaran, (4) tingkat partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan (5) tingkat penguasaan atau kontrol. Pemahaman mengenai akses (peluang) dan penguasaan (*kontrol*) perlu dibedakan secara tegas. Akses (peluang) yang dimaksud adalah kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya maupun hasilnya tanpa memiliki

kewenangan dalam menentukan penggunaan dan pengelolaannya. Sementara itu penguasaan (*kontrol*) diartikan sebagai kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terkait penggunaan serta hasil dari sumber daya tersebut. Dengan demikian, seseorang yang memiliki akses terhadap suatu sumber daya belum tentu memiliki kontrol atas sumber daya tersebut, dan begitu pula sebaliknya.

Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) menekankan pentingnya perempuan memiliki kontrol terhadap berbagai sumber daya, baik yang bersifat materi maupun nonmateri, serta adanya redistribusi kekuasaan di dalam maupun antar kelompok masyarakat (Grijns, Mies 1992). Di Indonesia jumlah perempuan yang relatif lebih besar di bandingkan laki-laki menjadikan pendekatan pemberdayaan sebagai strategi yang memandang perempuan bukan sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai potensi yang perlu dikembangkan untuk mendukung proses pembangunan (Muhammad Alim Ihsan, 2019:16).

b) Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Ambar T. Sulistyani (2004: 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan di atas. Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari harus

bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.

- 2) Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
- 3) Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

6. Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) merupakan salah satu program

yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk membantu masyarakat, khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera yang memiliki usaha mikro. Program ini diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada perempuan yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal.

Program PNM Mekar dirancang sebagai program pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya memberikan pembiayaan modal usaha, tetapi juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para nasabah. Melalui program ini, perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh pinjaman modal usaha tanpa agunan sehingga mereka dapat memulai ataupun mengembangkan usaha kecil yang dimiliki (Eling Mahyuni, 2020:75).

Dalam pelaksanaannya, program PNM Mekar menggunakan sistem kelompok. Para nasabah dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang melakukan pertemuan secara rutin setiap minggu. Pertemuan kelompok tersebut bertujuan untuk melakukan pembayaran angsuran, memberikan pembinaan usaha, serta mempererat kerja sama antar anggota kelompok. Melalui sistem ini, para nasabah

juga dapat saling berbagi pengalaman dan saling memberikan motivasi dalam menjalankan usaha.

Selain memberikan pembiayaan modal usaha, PNM Mekaar juga memberikan pendampingan kepada para nasabah agar mereka dapat mengelola usaha dengan baik. Pendampingan tersebut dilakukan oleh petugas lapangan yang bertugas memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada para nasabah agar mampu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha yang dimiliki.

Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar mempunyai kriteria bagi nasabah yang wajib dipenuhi yaitu, 1) Layanan PNM Mekar diperuntukkan kepada perempuan pra sejahtera pelaku usaha mikro. 2) Pembiayaan PNM Mekar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat disiplin dalam mengikuti proses persiapan. 3) Satu kelompok terdiri 10 nasabah. 4) Setiap 1 kelompok dipimpin oleh seorang ketua. 5) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam 1 minggu sebagai kegiatan membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha (Sevina & Humaemah, 2022:245).

Program PNM Mekar juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Dengan adanya akses pembiayaan serta pendampingan usaha, diharapkan perempuan dapat mengembangkan usaha mikro yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan memperbaiki kesejahteraan hidup. Melalui program ini, perempuan juga didorong untuk lebih aktif berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, program PNM Mekaar tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan modal usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kemampuan usaha, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan keluarga. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha mikro di berbagai daerah, termasuk di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

7. Faktor Pendukung PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar

a) Kebijakan Pemerintah.

Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar merupakan suatu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan

tujuan pemberdayaan perempuan. Program Permodalan Nasional Madani Mekar ini membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Pemberdayaan perempuan atau ibu-ibu di prioritaskan karena PT Permodalan Nasional Madani menganggap bahwa perempuan mampu menjalankan dan mengembangkan usaha yang akan atau sudah dimulai dan untuk mencapai kesejahteraan.

b) Syarat pengajuan pinjaman Permodalan Nasional Madani(PNM) mekar.

Syarat pengajuan yang mudah dan bisa diakses oleh masyarakat usaha mikro, khususnya para perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro kecil dan menengah bisa dengan mudah mendapat pinjaman karena syarat pinjaman permodalan nasional madani (PNM) mekar yang tidak terlalu berat dipenuhi. Diantaranya pinjaman ini hanya untuk para perempuan pelaku UMKM, tidak mewajibkan adanya jaminan atau agunan,bersifat tanggung renteng hingga nasabah mendapat pembinaan agar usahannya bisa berhasil dan mencapai kesejahteraan hidup.

- c) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar berusaha untuk mencegah terlibat dalam hutang rentenir.

Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar berusaha untuk mencegah masyarakat khususnya pada perempuan agar tidak terlibat dalam hutang rentenir karena banyaknya sekarang ini berbagai macam pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Dan sebagian dari masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa dari rentenir dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan formal. Tanpa memikirkan bahwa meminjam kepada rentenir biasanya akan dikenakan persentase bunga yang cukup besar serta penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak rentenir apabila peminjaman mulai terlambat membayar cicilan.

- d) Kepercayaan terhadap program PNM Mekar.

Kepercayaan yakni keyakinan dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar memberikan pinjaman bahwa para perempuan atau ibu - ibu prasejahtera akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya

sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- e) Pembiayaan angsuran Pinjaman Modal Oleh Program PNM Mekar.

Pembiayaan yang dilakukan Permodalan Nasional Madani menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat mengembalikan kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah atau anggota kelompok PNM Mekar mampu mengembangkan usaha dalam rangka mengapai cita-cita dan meningkatkan keluarga (Azwar & Indra Rahmat, 2023:9).

8. Faktor Penghambat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar

- a) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Usaha

Salah satu hambatan dalam pemberdayaan perempuan adalah masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mengelola usaha. Banyak perempuan yang memiliki usaha mikro, namun belum memiliki kemampuan manajemen usaha yang baik, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, serta pengembangan usaha.

Hal ini menyebabkan pemanfaatan modal usaha belum optimal.

b) Tingkat Kedisiplinan Anggota Kelompok

Program PNM Mekar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang menuntut kedisiplinan anggota dalam mengikuti pertemuan mingguan dan membayar angsuran tepat waktu. Namun, masih terdapat anggota kelompok yang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan kelompok, sehingga dapat menghambat kelancaran program pemberdayaan.

c) Pemanfaatan Modal yang Belum Maksimal

Sebagian peserta program belum mampu memanfaatkan modal usaha secara efektif untuk mengembangkan usaha. Kondisi ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman usaha, keterbatasan inovasi, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan modal usaha.

d) Keberhasilan Usaha yang Belum Merata

Tidak semua perempuan peserta program mengalami perkembangan usaha yang sama. Ada sebagian anggota yang mampu mengembangkan usahanya, tetapi ada juga yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan usaha. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor kemampuan

individu, kondisi ekonomi keluarga, serta dukungan lingkungan sekitar.

e) Program PNM Mekar Hanya Diperuntukkan Bagi Perempuan

Program Permodalan Madani Nasional hanya memberikan layanan untuk para perempuan. Pada program permodalan nasional madani (PNM) Mekar merupakan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Peminjaman modal ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Sementara bagi Laki-laki juga membutuhkan modal usaha dalam melakukan pekerjaan, yang mana diketahui bahwa elaki adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk kepenuhan atau kebutuhan ekonomi sehari-hari (Ulya & Noviriani, 2025:385).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis jadikan sebagai bahan kajian yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti saat ini, dengan tujuan untuk mempermudah penulismemperoleh gambaran-gambaran serta mencari titik-titik perbedaan. Sebagai bahan kajian terdahulu, penulis

menemukan hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan skripsi.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Devi Susanti (2022) yang berjudul Peran Program Mekar dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran program Mekar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Mekar yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha kecil. Selain memberikan pembiayaan modal usaha, program ini juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para nasabah sehingga mereka mampu mengembangkan usaha yang dimiliki. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai peran program Mekar dalam pemberdayaan perempuan. Perbedaanannya terletak pada lokasi penelitian.
- 2) Selanjutnya, Hanis(2020) yang berjudul Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan sangat dipengaruhi oleh adanya pelatihan keterampilan,

pembinaan berkelanjutan, serta dukungan kelompok sosial. Penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan yang tergabung dalam kelompok PKK mengalami peningkatan kepercayaan diri, kemampuan mengelola usaha rumahan, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti karena sama-sama menyoroti pentingnya pendampingan kelompok dalam meningkatkan keberdayaan perempuan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian Hanis berfokus pada program PKK, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada program pembiayaan mikro PNM Mekar.

- 3) Penelitian berikutnya oleh Latipah(2020) dengan judul Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Media dalam Peningkatan Pendapatan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya membutuhkan bantuan modal usaha, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi keuangan, keterampilan pemasaran, serta kemampuan memanfaatkan teknologi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perempuan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran bahwa pemberdayaan perempuan

merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan dukungan berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pelatihan usaha.

- 4) Penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2021) yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Melalui Program PNM Mekaar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program Mekaar dapat membantu perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Mekaar memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan. Selain itu, adanya kegiatan pertemuan kelompok secara rutin juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kedisiplinan, kerja sama, serta rasa tanggung jawab para nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas pemberdayaan perempuan melalui program Mekaar, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 5) Penelitian lain yang dilakukan oleh Raudah, Hidayatullah, dan Dkk(2025) yang berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa keberhasilan program

pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendampingan yang intensif, pelatihan yang berkelanjutan, partisipasi aktif peserta, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan rasa percaya diri perempuan, meningkatkan kemampuan mengelola usaha, serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas efektivitas program pemberdayaan perempuan, namun penelitian tersebut lebih menekankan pada program pemerintah daerah, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada program pemberdayaan melalui lembaga keuangan non-bank yaitu PNM Mekar.

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berpikir yang dibuat untuk mengetahui bagaimana peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar dalam pemberdayaan perempuan masyarakat Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Program PNM Mekar memberikan pembiayaan modal usaha serta pendampingan kepada perempuan pelaku usaha mikro agar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki. Melalui program tersebut diharapkan perempuan dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha sehingga menjadi

lebih mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan bentuk peran PNM Mekar dalam pemberdayaan perempuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bagan 1.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Peneliti